BE-HISZ Journal
Journal of Economics and Accounting

VOL. 2 No. 1 2025

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BALEE UJONG RIMBA PADA KANTOR CAMAT MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE
Zulkifli Umar, Irmawati, Nadia Zakia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Budi Safatul Anam, Zulkifli Umar, Yusnadi

ANALISIS FAKTOR DOMINAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KEUANGAN POLDA ACEH
Aliamin, Hendri Mauliansyah, Rachmad Fadhli

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN BIAYA PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN ACEH
Cut Israeta, Syamsidar, Fitri Yunina

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR LAPAS KELAS II-A BANDA ACEH
Zulkifli Umar, Yusliana, Fahril Ulya

ADPEN
ASOSIASI DOSEN DAN PRAKTISI EKONOMI NUSANTARA

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN BIAYA PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN ACEH

Cut Israeta [1]; Syamsidar[2]; Fitri Yunina[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Aceh
cutisraeta@unmuha.ac.id

ABSTRACT
This research was conducted at the Aceh Transportation Agency in the context of the preparation of an accountability report based on Permendagri Number 55 of 2008 concerning Procedures for Administration and Preparation of Treasurer Accountability Reports. This study aims to find out and analyze the application of Accountability Accounting as a Tool for Controlling Budget Costs at the Aceh Transportation Office. The research techniques used are field research and literature research.
This research method uses a descriptive method, which is a method of data that is collected, processed and classified, analyzed, and interpreted so as to obtain a clear picture of the problem being studied.
The results of this study show that the implementation of accountability accounting has been effectively implemented at the Aceh Transportation Office, but there are few obstacles in the realization that occurred in the sea transportation sector with the emergence of receivables in 2017, This is due to the KMP ship operating lease. BRR in 2016 was slightly constrained by the extension of the ship operating contract. The application of accountability accounting plays a very effective role in supporting the efficiency of budget cost control and the assessment and performance of employees at the Aceh Transportation Office.
Keywords: accountability accounting, cost control tools, budget.

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Anggaran Pada Kantor Dinas Perhubungan Aceh. Teknik Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode data yang dikumpulkan, diolah dan diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban telah efektif dilaksanakan pada Kantor Dinas Perhubungan

Aceh, namun terdapat sedikit kendala pada realisasi yang terjadi di sektor perhubungan laut dengan munculnya nilai piutang pada tahun 2017, hal ini dikarenakan sewa pengoperasian kapal KMP.BRR pada tahun 2016 sedikit terkendala pada perpanjangan kontrak pengeoperasian kapal. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban berperan sangat efektif untuk menunjang efesiensi pengendalian biaya anggaran dan penilaian dan kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Aceh.

Kata kunci : akuntansi pertanggungjawaban, alat pengendalian biaya, anggaran.

I. PENDAHULUAN

Anggaran biaya merupakan perincian rencana penggunaan keuangan untuk jangka waktu tertentu disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan pemerintahan yaitu diantaranya biaya terkendali, biaya di mana kepala Dinas dapat mempengaruhi ada tidaknya dan besar kecilnya biaya tersebut. Apabila seorang kepala Dinas tidak dapat mempengaruhi suatu biaya melalui kebijakannya, maka biaya tersebut merupakan biaya tak terkendali bagi kepala Dinas tersebut. Oleh karena itu, semua biaya dapat dikendalikan pada tingkat manajemen tertentu jika suatu biaya tidak dapat dikendalikan pada tingkat manajemen tertentu, maka biaya tersebut harus dapat dikendalikan oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi. Berdasarkan konsep pengendalian biaya, setiap pos biaya pada suatu departemen atas unit organisasi harus diklasifikasikan dan ditentukan secara jelas sebagai biaya terkendali dan biaya tak terkendali pada setiap pusat pertanggungjawaban tertentu. Penentuan secara tegas ini sangat penting terutama dalam pengendalian biaya untuk laporan pelaksanaan, yang di dalamnya membandingkan antara realisasi dengan yang dianggarkan. Disisi lain penilaian kerja merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pembangunan sumber daya manusia, baik di sektor publik maupun swasta. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran terhadap tingkat penyelesaian *(degree of completion)* tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai selama masa tertentu dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan karakteristik tugas tersebut. Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Goodgovernance*) dengan menyelenggarakan tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya, dan manajemen pemerintah yang transparan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh dan Undang–Undang Nomor 28 tahun 1999. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan, dan Bidang Komunikasi Informasi dan Telematika yang bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan lapangan Dinas Perhubungan Aceh tentu memiliki berbagai kendala baik dalam ruang lingkup kecil dan rauang lingkup besar yaitu diantaranya, permasalahan selisih waktu antara proses perencanaan dan proses realisasi anggaran sehingga banyak pembangunan yang harus ditambah waktu pengerjaannya untuk menghindari terjadinya pemutusan kontrak yang akan berakibat fatal, hal ini tentu tidak baik bagi realisasi keuangan Dinas Perhubungan Aceh apabila terjadi terus menerus.Sebagian besar keterlambatan realisasi anggaran terhadap pembangunan sektor perhubungan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu diantaranya faktor alam, misalkan cuaca buruk dan hujan berkepanjangan sehingga matrial berupa tanah, batu gunung sulit untuk diperoleh sehingga pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah tercantum didalam kontrak.

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Anggaran

Mauliansyah (2017) mengemukakan bahwa: "Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang." Sedangkan

pengertian anggaran menurut *National Committee on Governmental Accounting (NCGA)*yang dikutip oleh Haruman (2014) mengemukakan bahwa: "Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu."

2.2 Penilaian Kinerja

Wahyudi (2012) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah: "Suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya." Sedangkan menurut Simamora (2013) adalah: "Proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan."

2.3. Akuntansi Pertanggungjawaban

Mulyadi (dalam Tin dan Hidayat 2012:188) menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah "Suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan/atau pendapatan yang dianggarkan". Sedangkan menurut Hamdiah akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan-pengetahuan umum, dimana kegagalan-kegagalan bisnis dapat diefektifkan dengan cara mengendalikan tanggungjawab orang-orang untuk membawanya keluar operasionalisasi.

2.4. Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Mulyadi (2012) menyatakan bahwa dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban di perusahaan, terdapat lima syarat utama dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yaitu, pembagian organisasi yang jelas, adanya anggaran biaya, adanya pengelompokkan biaya terkendali dan tidak terkendali, pengklasifikasian kode rekening, dan sistem pelaporan biaya yang mampu dipertanggungjawabkan.

2.5. Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran sebagai Alat Pengendalian Anggaran Biaya

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya (syamsidar et all, 2024:30). Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan/atau biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab (Mulyadi, 2011). Dengan adanya anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk menilai kinerjanya jika kinerja yang dinilai baik maka manajer secara individual akan diberi penghargaan sehingga manajer termotivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, dan jika kinerja yang dinilai tidak baik maka manajer secara individual akan diberi hukuman atau sanksi sehingga manajer termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penilitian ini merupakan penelitian kualitatif (deskriptif) dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja anggaran Dinas Perhubungan Aceh yang meliputi proses penganggaran, dan realisasi anggaran 2016, sebagai wujud daripada laporan akuntansi pertanggungjawaban.

3.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa opini dan informasi dari responden yang diperoleh dengan memberikan kuesioner, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Objek dari penelitian ini yaitu informasi realisasi anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Provinsi Aceh Tahun 2016-2018.

3.4 teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*field research*) dengan cara meneliti secara langsung ke Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh untuk memperoleh informasi data anggaran yang dapat melengkapi penyusunan skripsi ini untuk mengumpulkan data lapangan digunakan instrument dalam observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait laporan realisasi anggaran belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh.

3.5 teknis analisis data

1) Untuk mengetahui realisasi anggaran pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitif yaitu untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang kedudukan, fungsi dan problematika realisasi anggaran pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh. Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini maka penulis menggunakan analisis rasio efektivitas dan efisiensi.
2) Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja, (Munawir, 2013:168) yaitu:
3) Efektifitas = $\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$ x 100%
4) Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja (Halim, 2012:41):

   Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}$ x 100%

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Efektivitas Anggaran Belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh

Dari hasil pengamatan pada laporan anggaran dan realisasi Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2016-2018, maka efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, berada pada kategori Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh mengalami kestabilan kinerja terkait dalam hal belanja. Menurut Ihyaul (2015:26) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif

apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*pending wisely*). Agar dapat memperbaiki kinerja dalam hal ini terkait belanja, Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh sebaiknya mengevaluasi kembali apa yang menjadi keperluan untuk belanja serta menetapkan anggaran belanja sesuai dengan keperluan. Dengan demikian, pelaksanaan pengeluaran menjadi lebih efektif.

4.2. Efisiensi Anggaran Belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh
Dari hasil pengamatan pada laporan anggaran dan realisasi belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh pada tahun anggaran 2015-2017, maka efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh tahun anggaran 2016-2018, selama tiga tahun berada pada kategori Tidak Efisien. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan pemborosan anggaran. Nordiawan dan Ayuningtiyas (2014:161) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*) Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh harus mampu menekan biaya serendah mungkin agar meningkatkan kinerja, sehingga tingkat efisiensi belanja menjadi lebih efisien.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa; (1) Realisasi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berdasarkan analisis rasio efektivitas Tahun Anggaran 2016-2018 pada kategori Efektif dengan nilai efektivitas sebesar 97,18% pada tahun 2016, sebesar 99,91% pada tahun 2017, dan sebesar 99,63% pada tahun 2018. (2) Realisasi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berdasarkan analisis rasio efisiensi Tahun Anggaran 2016-2018 pada kategori Tidak Efisien dengan nilai efisiensi sebesar 102,90% pada tahun 2016, sebesar 100,09% pada tahun 2017, dan sebesar 100,37% pada tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Aries, Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Basariyah, Siti. (2017). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 5 (6), 63-74.

Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Darise, Nurlan. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks

Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi* Empat. Salemba Empat. Jakarta.

Hamdiah, C. (2024). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM), 1(1), 124-139.

Ihyaul, Ulum. (2015). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Julita. (2014). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dosen Universitas Muhammadyah Sumatera Utara.*

Kerlinger, FN. (2000). *Asas-asas penelitian behavior.* Terjemahan Landung R Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mahmudi. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE.

Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset

Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Marbun, dkk. (2014). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Media Pustaka.

Mauliansyah, H. (2017). *Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran. Besaran Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dan Perubahan Anggaran terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara)*(Doctoral dissertation, Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh).

Miles, M. B, dan Huberman, A. M. (2012).

Munandar, A. S. (2014). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: UI Press.

Munawir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.

Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Dedi. (2011). *Akuntasi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Pangkey, Imanuel. (2015). Analis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provini Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3 (4), 33-43.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Robbins, Stephen P & Coulter, Mary. (2015). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Rudianto. (2014). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Grasindo.

Sari, Dwi Novita, Sri Minarti dan Salmah Pattisahusiwa. (2018). Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal KINERJA*, 15, (1), 38-45.

Sekaran, & Bougie. (2013). *Research Methods for Business: A skill Building Approach.* New York: John wiley Sons.

Syamsidar, S., Sari, D. P., Mauliansyah, H., & Maisura, N. (2024). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM), 1(1), 19-38.

Untari, Rusita. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2011-2014. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.*